

ABSTRAK

Cindy Aulia (NIM 1228010045), 2026, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. Meskipun capaian pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Cisarua tergolong baik, realisasi penerimaan masih belum sepenuhnya mencapai pokok ketetapan yang telah ditetapkan. Selain itu, masih ditemukan permasalahan berupa ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi riil di lapangan, rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta kendala administratif yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Cisarua pada umumnya telah berjalan dengan baik. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, serta komitmen pelaksana mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif, teknis, serta pengaruh kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, kendala tersebut tidak menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 juga telah mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PBB-P2, Pendapatan Asli Daerah.